

Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI

Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing companies listed on the IDX

Fauzi Akbar Maulana Hutabarat¹⁾*

1) Magister Ilmu Manajemen, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011 dibandingkan dengan tahun 2011-2013. Penelitian ini adalah modifikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah (2014), dan Sandi & Lukviarman (2015) dengan mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah proporsi kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, komite audit dan kualitas audit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif dengan cara membandingkan dua hasil penelitian terdahulu, dan menganalisis perbandingan dari hasil penelitian tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari hasil penelitian-penelitian yang akan di dibandingkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011 Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*; komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan pada tahun 2011-2013 Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*; Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan, Penghindaran Pajak, Perusahaan Manufaktur

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009-2011 compared to 2011-2013. This study is a modification and development of research conducted by Fadhillah (2014), and Sandi & Lukviarman (2015) with the corporate governance mechanism used is the proportion of institutional ownership, Independent Board of Commissioners, audit committee and audit quality. The research method used is comparative research by comparing the results of two previous studies and analyzing the comparisons of the results of these studies. The type of data used in this study is secondary data taken from the results of the studies to be compared. The results of the study show that in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009-2011 institutional ownership has no effect on tax avoidance; Independent Board of Commissioners has no effect on tax avoidance; audit quality has a significant positive effect on tax avoidance; the audit committee has a significant positive effect on tax avoidance, while in 2011-2013 Institutional Ownership has no significant effect on tax avoidance; Independent Commissioner has a negative and significant effect on tax avoidance; Audit quality has a negative and significant effect on tax avoidance; The Audit Committee has a negative and significant effect on tax avoidance.

Keywords: Corporate Governance, Tax Avoidance, Manufacturing Company

*E-mail: famhutabarat@gmail.com

ISSN 2746-6396 (Online)



PENDAHULUAN

Pajak menurut Pasal 1aUU No 28aTahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Amin & Suyono, 2020). Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar, penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk mendorong kemajuan ekonomi, membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan, serta kemakmuran rakyat. (Amin & Suyono, 2020)

Penerimaan tersebut digunakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendukung ketahanan dan keamanan. Begitu besarnya peran pajak bagi negara, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. (Sumantri et al., 2018). Menurut Setiawan dalam (Amin & Suyono, 2020) pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Dalam upaya mengurangi beban pajak, perusahaan dapat melakukan berbagai macam cara salah satunya penghindaran pajak (*Tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah salah satu cara dari manajemen pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak dari nominal seharusnya, namun dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah yang ada didalam perundang-undangan perpajakan (Putri, 2017) Beberapa variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* menurut Darmawan IGH dan Sukartha IM (2014) salah satunya adalah *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Prasetyo, 2018). Karakteristik *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan manajerial.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam (Fadhilah, 2014) prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi (*transparency*)
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*)
Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- c. Responsibilitas (*responsibility*)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- d. Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusional pada akhir tahun. Pemilik institusi yang dimaksud adalah pihak luar yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan tersebut biasanya dimiliki oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, lembaga asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Indriawati, 2017).

Komisaris Independen

Menurut Ghazali dalam (Amin & Suyono, 2020) Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi untuk bertindak independen. Berdasarkan peraturan BEI nomor kep-205/BEI/07-2004 setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman *corporate governance* (Eksandy, 2017)

Komite Audit

Pada umumnya, komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang-kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut: Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance*.

Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam corporate governance adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham.

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) peraturan perpajakan sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Mukhsin, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Penelitian ini akan membandingkan hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan tentang topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari (Sandy & Lukviarman, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel Kepemilikan Institutional sebesar -0,220 dan signifikan 0,052. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Koefisien regresi variabel Proporsi Komisaris Independen sebesar -0,598 dan signifikan 0,000 dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Koefisien regresi variabel Kualitas Audit sebesar -0,086 dan signifikan 0,000 dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Koefisien regresi variabel Komite Audit sebesar -0,132 dan signifikan 0,000 dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan hasil penelitian dari (Fadhilah, 2014) adalah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien β kepemilikan institusional bernilai negatif sebesar 0,520 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,488 < 2,004$, dengan signifikansi $0,626 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Nilai koefisien β proporsi Dewan Komisaris Independen bernilai positif sebesar 0,017 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,029 < 2,004$, dengan signifikansi $0,977 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Nilai koefisien β komite audit bernilai bernilai positif sebesar 0,390 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,257 > 2,004$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Nilai koefisien β kualitas audit bernilai negatif sebesar 0,008 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,077 > 2,004$, dengan signifikansi $0,939 > 0,05$. Hal ini berarti kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 1 Perbandingan Hasil Penelitian Fadhilah, 2014 dan Sandy & Lukviarman, 2015

<i>Coorporate Governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Hasil Penelitian Fadhilah, 2014	Hasil Penelitian Sandy & Lukviarman, 2015
Kepemilikan Institutional	Tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	Tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
Komisaris Independen	Tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
Kualitas Audit	Berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
Komite Audit	Berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing variabel bebas (Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit) memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap variabel terikat (*tax avoidance*).

Kepemilikan Institusional

Pada hasil penelitian (Fadhilah, 2014) kepemilikan institusional Tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan pada hasil penelitian (Sandy & Lukviarman, 2015) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komisaris Independen

Pada hasil penelitian (Fadhilah, 2014) Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan pada hasil penelitian (Sandy & Lukviarman, 2015) Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

Kualitas Audit

Pada hasil penelitian (Fadhilah, 2014) Kualitas Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan pada hasil penelitian (Sandy & Lukviarman, 2015) Kualitas Audit Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

Komite Audit

Pada hasil penelitian (Fadhilah, 2014) Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan pada hasil penelitian (Sandy & Lukviarman, 2015) Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

SIMPULAN

Dari hasil penelitian (Fadhilah, 2014) dan (Sandy & Lukviarman, 2015) terdapat perbedaan hasil. Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011, Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*; komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013 Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*; Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti, perbedaan waktu penelitian, jumlah sampel dalam penelitian, dan karakteristik sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2016 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 248-259.
- Darmawan IGH dan Sukartha IM. (2014). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran perusahaan pada penghindaran pajak*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.
- Fadhilah, R. (2014). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1-22. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>
- Eksandy, Arry. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

- Tangerang. Vol. 1. No. 1.
- Mukhsin, Muhamad. 2018. *Pengaruh GCG terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Prasetyo, Irwan. Bambang Agus Pramuka. 2018. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen terhadap Tax avoidance*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA). Vol.20 No.02 (2018).
- Putri, Alifianti Herdian. Anis Chariri. 2017. *Pengaruh Financial Distress dan Corporate Governance terhadap Praktik Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur*. Ejournal-s1.undip.ac.id. Vol.6(2). Hal.1-11.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). *Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sumantri, F. A., Anggraeni, R. D., & Kusnawan, A. (2018). *Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 1(2), 3–8.